

# KONFERENSI JOGJA 1955: SUATU MOMENTUM MENUJU KEBANGKITAN MILITER PRETORIAN DI INDONESIA

Firman Noor, Ph.D<sup>1</sup>

**Abstract** - Today, Indonesia has enjoyed a limited role of military in politics. But not long time ago, during the New Order Era, the role of military was strong and even omnipresents. This paper wants to trace back the moment that indicates the early stage of the Indonesia military to be independent power, which was also implying the very characteristic of praetorian. From the discussion, we can see that the TNI outlook as one of the powerful body in Indonesia political system evolves gradually. The position of military was in fact at a nadir point when the civilian politicians took control in every aspect of national politics, particularly in the early years of “Liberal Democracy” era. The Jogja conference in 1955 indicates the important shift from professional to be praetorian in Indonesia military history.

**Keywords** : praetorian, civil supremacy, military politics, TNI

## Pendahuluan

Keterlibatan militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam dunia politik di Indonesia sesungguhnya telah terlihat sejak awal kemerdekaan. Berbeda dengan yang terjadi di belahan dunia lainnya, TNI merupakan salah satu dari sedikit angkatan bersenjata yang dilahirkan sebagai tentara kebebasan nasional atau tentara kemerdekaan,<sup>2</sup> yang sejak kelahirannya telah “dipaksa” untuk berkecimpung dalam dunia yang kompleks di luar persoalan keprajuritan. Menurut Nugroho Notosusanto kaum militer Indonesia pada saat itu lebih menempatkan dirinya sebagai seorang pejuang terlebih dahulu ketimbang telah dengan sadar menempatkan dirinya sebagai seorang profesional militer. Dia meyakini bahwa sebagian dari para pejuang itu belum memiliki bayangan akan bentuk suatu institusi militer yang profesional dimana dirinya akan berkecimpung selama-lamanya di dalamnya pasca perjuangan kemerdekaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti Bidang Nasional pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (P2P-LIPI) dan Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Menyelesaikan Program S-3 pada University of Exeter, Inggris.

<sup>2</sup> Selain Indonesia hanya tiga negara di seluruh dunia yang memiliki tentara yang masuk dalam kategori Tentara Kebebasan Nasional (*National Liberation Army*), yakni Aljazair, Vietnam dan Israel.

<sup>3</sup> Nugroho Notosusanto, “Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia”, dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 1-11.

Sebagai konsekuensi dari pengalaman tersebut, TNI pada akhirnya tidak terlihat canggung untuk turut serta berkecimpung dalam dunia non-militer, termasuk politik. Bahkan, dalam periode waktu yang cukup panjang, TNI meyakini bahwa keterlibatan dalam dunia politik merupakan hal yang sejalan dalam konteks perjuangan itu sendiri yang harus diemban oleh setiap prajurit. Crouch beranggapan bahwa penerimaan prinsip mengenai keunggulan sipil dalam politik, misalnya, di kalangan tentara tidak berarti membuang anggapan dan keyakinan di kalangan terbesar kaum militer bahwa sumbangan tentara di masa revolusi telah memberikan hak kepada mereka untuk meneruskan peran politik dimasa-masa sesudahnya.<sup>4</sup>

Selain itu, TNI, sebagai suatu institusi, lahir bukan dari suatu rencana yang sudah diatur matang dan mantap dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah profesional di dalam konteks pertahanan keamanan. Dapat dikatakan bahwa kelahiran TNI berlangsung di tengah nuansa serba tergesa-gesa, seiring dengan kebutuhan yang amat mendesak untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ancaman keamanan atas republik yang masih belia pada saat itu. Berbagai peristiwa penting yang melibatkan TNI pada masa-masa awal kemerdekaan telah menyeret militer dalam kedudukan yang sulit untuk melepaskan diri dari persoalan politik.<sup>5</sup> Peranan TNI dalam menanggulangi berbagai kejadian-kejadian seperti, “Peristiwa 3 Juli”, “Peristiwa Pemberontakan Madiun oleh PKI”, atau pada masa “Aksi Militer Belanda ke II”, bukan saja terdorong oleh karena fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara namun ada unsur politik yang beraksi dalam penyelesaian kejadian-kejadian itu.

Kenyataan ini jelas berpengaruh terhadap pembinaan awal di tubuh TNI, yang pada akhirnya makin memperkuat eksistensi militer non-profesional. Onghokham berkomentar pada masa revolusioner itu profesionalisme diberbagai bidang menjadi norma yang tidak dikenal dan memang tidak atau kurang dipersiapkan oleh penguasa sebelumnya. Dengan demikian menurutnya apa salahnya kalau tentara kemudian menjadi direktur bank, pengasuh perkebunan, dan seterusnya. Dalam situasi seperti itulah akhirnya terbentuk Tentara Nasional Indonesia, yang menurut Onghokham menyebabkan tentara pada akhirnya melakukan fungsi-fungsi non-militer, baik fungsi politik maupun

---

<sup>4</sup> Lihat, Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hlm. 26-27

<sup>5</sup> Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: GMU Press, 1982), hlm. 222-223.

fungsi pemerintahan.<sup>6</sup> Situasi semacam ini tetap berlangsung hingga beberapa periode setelahnya.

Namun demikian, untuk menjadi suatu kekuatan politik yang benar-benar dominan, terutama pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, militer memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bahkan pada masa-masa sebelumnya, TNI cenderung mengakui supremasi sipil, yang kemudian menyebabkan militer hanya menjadi “adik kelas” yang kerap dijadikan alat petualangan para politisi.

Berkenaan dengan perjalanan militer menuju pusat kekuasaan, yang memuncak di era Orde Baru, tulisan ini ingin mengkaji mengenai kapan sesungguhnya militer di Indonesia dapat keluar dari “cengkraman” supremasi sipil untuk kemudian mampu menjadi kekuatan mandiri yang diperhitungkan?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, akan diketengahkan terlebih dahulu batasan mengenai karakteristik pretorian yang menjadi jati diri militer di Indonesia antara tahun 1955-1998, untuk membedakannya dengan jati diri militer pada masa sebelum (dan juga sesudahnya). Untuk kepentingan itu pembahasan pertama kali akan menelaah secara sederhana mengenai makna pretorian yang dimaksud. Dua pembahasan selanjutnya adalah (1) mengenai peran politik militer antara kurun waktu 1945-1954 dan (2) sikap politik militer di tahun 1955, yang kemudian juga menjadi momentum lahirnya pretorian di Indonesia.

### **Pretorian dan Momentum Kebangkitan**

Istilah pretorianisme atau disingkat pretorian diajukan oleh Eric A. Nordlinger, yang mengacu pada suatu tipikal militer yang tampil sebagai aktor politik yang berkecimpung dalam dunia kekuasaan, dan dengan kekuasaannya mereka dapat mengancam, bahkan dengan menggunakan kekuasaan, untuk memenuhi kepentingan dan aspirasinya.<sup>7</sup>

Nordlinger membagi tiga jenis pretorian, yakni *moderators*, *guardians*, dan *rulers*. Pretorian *Moderators* memiliki kekuasaan veto terhadap sejumlah jenis keputusan

---

<sup>6</sup> Ongkhokham, “Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah”, dalam *Analisa*, *op.cit*, hlm.92-93.

<sup>7</sup> Istilah itu diambil dari nama pengawal pretorian dari kemaharajaan Romawi, yakni satuan militer khusus untuk mengawal maharaja mereka itu pada akhirnya menggunakan kekuatan militernya untuk menumbangkan raja dan menguasai pemilihan umum.

pemerintah, namun tidak mengendalikan sendiri pemerintahan itu. Para *guardians* mengambil alih kekuasaan pemerintahan, namun semata-mata untuk mengatasi suatu krisis, dan karenanya hanya untuk suatu jangka waktu tertentu. Setelah krisis dapat diatasi, mereka membentuk pemerintahan sipil dan mengundurkan diri dari kegiatan pemerintahan, namun biasanya tetap melakoni peranan sebagai *moderators*. Para *rulers* jumlahnya tidak begitu banyak dibanding jenis yang lain, namun memegang kekuasaan yang luar biasa di dalam negaranya sebagai modernisator atau revolusioner.<sup>8</sup> Berdasarkan batasan di atas, tipikal moderator nampak lebih dekat dengan karakter utama politik TNI di tahun 1955 dan masa-masa tidak lama sesudahnya.

Terdapat beberapa syarat kemunculan suatu kelompok pretorian. *Pertama*, momentum awal biasanya ditandai dengan adanya ketidakpercayaan militer terhadap kemampuan kerja politisi sipil dalam persoalan pemerintahan dan kenegaraan. Di sini, militer telah sampai pada titik untuk tidak lagi menerima supremasi sipil begitu saja.<sup>9</sup> Lebih dari itu, muncul pula sebuah kepercayaan diri pada pihak militer untuk terjun dalam dunia politik untuk menutupi kelemahan kaum sipil.

*Kedua*, adanya keinginan militer untuk mandiri dan terbebas dari cengkraman dan tekanan pihak sipil, yang dipandang sudah menganggangi kepentingan dan mencampuri terlalu dalam urusan militer.<sup>10</sup> Kemandirian ini dapat berkembang luas hingga ke berbagai persoalan, termasuk kemandirian dalam konteks skala prioritas perjuangan atau agenda-agenda politik tertentu, yang tidak lagi sejalan atau sekedar sebagai bentuk reaksi terhadap agenda-agenda sipil. *Ketiga*, munculnya perasaan senasib dan sepenanggungan yang tercermin dari tumbuhnya kesolidan dan kesatuan semangat korps dalam batas-batas minimal tertentu. Secara praktis, tanpa adanya suatu “kesolidan minimal” memang hal-hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

*Keempat*, adanya keinginan dan kemampuan yang kuat untuk mewujudkan agenda-agenda politik secara mandiri, dengan berbagai cara. Artinya, persoalan agenda

---

<sup>8</sup> Lihat Eric Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 33-42.

<sup>9</sup> Munculnya militer dipangung politik negara-negara berkembang, menurut Arbi Sanit, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan kesemua unsur-unsur kehidupan masyarakat. Lihat Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 49.

<sup>10</sup> Lihat Muhaimin, *op.cit*, hlm.39; Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia, 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.462.

tidak lagi diposisikan sebagai suatu wacana, namun telah diupayakan di dalam bentuk aksi politik yang digerakkan dan dilaksanakan oleh kaum pretorian. Syarat keempat ini menjadi mutlak diperlukan, mengingat ketidakmampuan ataupun kegagalan mewujudkan kepentingan tidak saja akan membahayakan kelangsungan hidup kaum pretorian, namun malah dapat makin memantapkan superrotas pihak sipil atas militer.

### **Politik Militer 1945-1954: Era Politik Periferal**

Selama dasawarsa awal kemerdekaan, kehidupan politik belum terwarnai oleh kehadiran militer pretorian yang sesungguhnya. Berbagai peristiwa yang memperlihatkan keterlibatan militer dalam politik di tanah air, sesungguhnya belum cukup untuk membuktikan adanya karakter pretorian di dalam tubuh militer. Bahkan pada tahun 1945-1946, supremasi sipil demikian dijunjung tinggi. Hal ini tidak saja disebabkan karena penghormatan mereka terhadap keberadaan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, namun juga karena kesadaran spesialisasi peran dan tugas mereka sebagai alat negara yang mengayomi seluruh kepentingan bangsa. Kenyataan itu dapat dilihat misalnya dengan pernyataan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman yang menyatakan:

*“...tentara hanya mempunyai kewibawaan satu, ialah: mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudahlah cukup tentara teguh memegang kewajiban ini... Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga”.*<sup>11</sup>

Pemaknaan “alat suatu golongan” di atas, sesungguhnya memperlihatkan keinginan militer untuk membatasi diri dari persoalan-persoalan yang dapat menjerumuskan mereka kepada persoalan-persoalan di luar pertahanan.

Di sisi lain, keberadaan para perwira yang berasal dari KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger*) yang pada saat itu cukup berpengaruh di dalam jajaran elit militer turut memperkuat fenomena ini. Layaknya mereka yang beroleh pendidikan militer Barat, keterikatan perwira eks-KNIL kepada prinsip supremasi sipil terhadap militer dapat diharapkan, setidaknya lebih kuat dibandingkan perwira-perwira bekas PETA.<sup>12</sup> Dan hal

---

<sup>11</sup> “Perjalanan 52 tahun ABRI: Pikiran Dua Tokoh”, dalam, sisipan majalah *Dharma Sena*, Edisi Oktober, 1997, hlm.4.

<sup>12</sup> Meskipun harus pula diakui dalam perkembangannya kalangan eks KNIL pun akhirnya turut mendukung “intervensi” militer dalam bidang-bidang non-militer. Tidak itu saja, A.H Nasution, seorang jenderal eks  
Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1 73

tersebut memang terlihat, salah satunya dari pemikiran KSAP Mayor Jenderal Simatupang seorang jenderal eks-KNIL yang menyatakan:

*“Pada waktu itu (masa-masa awal kemerdekaan pen.) pikiran saya diliputi oleh bayangan kekhawatiran yang mengingatkan pada peristiwa jatuhnya rezim Kuomintang dan rangkaian coup dan contra-coup di Amerika Latin. Sejarah Kuomintang merupakan contoh yang gamblang bagi saya tentang ketidakmampuan suatu rezim yang didasarkan pada kekuatan militer untuk memimpin suatu revolusi yang berhasil...saya menyadari, sebagai salah satu dari tugas saya ialah untuk berusaha supaya sejarah Amerika Latin dan sejarah Kuomintang jangan sampai terulang di Indonesia”.*<sup>13</sup>

Pada kurun waktu 1946-1949, karakter politik militer di atas belum beranjak secara berarti. Beberapa peristiwa seperti “Peristiwa 3 Juli”, “Pemberontakan PKI”, maupun “Aksi Militer Belanda”, yang melibatkan militer baik dalam konteks profesi maupun politis, tidak cukup mampu merubah dan menggugah orientasi mereka. Bahkan kesetiaan militer terhadap sipil masih dapat diandalkan. Dapat dikatakan bahwa politik militer pada masa itu hanya sebatas “mengeluhkan” sikap perjuangan pihak sipil yang seolah tidak menghargai hasil jerih payah perjuangan dan pengorbanan mereka. Selebihnya, mereka tetap rela diperintah dan diposisikan di bawah kekuasaan sipil.

Menurut Sundhaussen, di satu sisi, sampai dengan tahun 1949, militer di Indonesia masih heterogen, akan tetapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan keadaan dalam 1945/1946. Para perwiranya sudah mulai yakin terhadap diri sendiri, mulai bersikap curiga terhadap kaum politisi, dan mulai sadar akan kepentingan mereka sebagai suatu golongan. Lebih dari itu, sudah mulai pula ada semacam program politik bersama di antara mereka. Di sisi lain, pandangan atau konsep mereka tentang di manakah seharusnya posisi politik yang harus mereka jalani belumlah jelas.<sup>14</sup>

Sampai tahun 1950-an awal sikap militer secara umum tidak berubah. Menurut Sundhaussen, era itu memang ditandai oleh makin memuncaknya kekecewaan militer

---

KNIL-lah yang justru mencetuskan ide “jalan tengah” yang pada gilirannya membawa militer dalam suatu perkembangan baru yakni pemantapan keikutsertaan mereka di dalam dunia kepolitikan dan juga bahkan ekonomi.

<sup>13</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia, 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 88.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 84.

terhadap sipil, dan makin dipertanyakannya supremasi sipil. Namun, keterlibatan mereka dalam politik masih bersifat pinggiran atau perifer saja.

Pada saat itu sistem politik Indonesia tengah berada dalam genggaman politisi sipil. Di era yang kemudian disebut sebagai “Demokrasi Liberal“, partai-partai politik di Indonesia tengah berada dalam puncak kedudukannya dan memainkan peran yang sangat menentukan.<sup>15</sup> Kemunculannya merupakan konsekuensi dari kepercayaan bangsa pada model sistem pemerintahan demokrasi, yang bercampur dengan masih menggejalanya praktek bapak-isme,<sup>16</sup> dengan partai-partai politik sebagai motor utamanya. Secara umum, kekuasaan yang dimiliki oleh politisi sipil saat itu terasa tidak saja dalam konteks menentukan arah kebijakan namun pula dalam konteks menentukan agenda politik apa saja yang layak dikedepankan atau tidak. Inilah yang disebut sebagai kemampuan untuk menciptakan *agenda setting*,<sup>17</sup> yang mengindikasikan demikian berpengaruhnya kalangan politisi sipil pada saat itu. Dalam situasi sistem politik sedemikian menyebabkan pihak militer memiliki ketergantungan yang relatif tinggi kepada para politisi.

Bahkan, beberapa peristiwa yang ada pada masa-masa itu, terutama peristiwa pada tahun 1952 malah semakin membuat militer menjadi “bulan-bulanan“ politisi sipil dan alat kepentingan mereka. Beberapa elit militer ternama tersingkirkan dan institusi militer mengalami perpecahan yang demikian akut. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa 17 Oktober 1952” adalah puncak dari perbedaan pendapat di kalangan militer. Perpecahan itu membelah militer menjadi dua yakni antara mereka yang lebih mengutamakan profesionalisme, yang dekat dengan kalangan politisi bertipe “adinsitrator”, dengan kalangan militer yang menganggap sepi profesionalisme, yang dengan para politisi “penggalang solidaritas”.

Pertentangan itu sendiri sebenarnya juga dipicu oleh campur tangan pihak sipil, dengan bantuan berbagai kalangan yang mereka bina di dalam tubuh TNI. Pertentangan itu sendiri terkait dengan persoalan pemecataan Kolonel Bambang Supeno seorang

---

<sup>15</sup> Mengenai Era Demokrasi Liberal lihat misalnya, Herbert Feith, *The Decline of the Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1964).

<sup>16</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 33-34.

<sup>17</sup> Steven Lukes, *Power A Radical View*, (New York: Palgrave MacMillan, 2005), hlm. 25-29.

perwira PETA, yang didukung oleh para politisi sipil untuk menduduki jabatan strategis, oleh Kolonel Nasution.

Kalangan profesional di bawah pimpinan Nasution yang melakukan tindakan pemecatan itu menganggap apa yang dilakukan oleh parlemen untuk mengangkat Supeno sebagai petinggi militer tanpa konsultasi yang mendalam dengan pihak militer sudah demikian keterlaluan. Namun, karena ketidakkompakan dan belum meratanya kesadaran pretorian di tubuh militer, serta ketidakjelasan agenda menyebabkan peristiwa ini dapat dikenang hanya sebatas “gerakan protes yang tanpa hasil”. Bahkan akibat dari peristiwa ini sejumlah perwira militer diskors, termasuk KSAP Mayor Jenderal Simatupang dan KSAD Kolonel A.H Nasution.

Ketidakkompakan itu tidak saja pada akhirnya memecahbelah kepentingan dan agenda yang sama di dalam tubuh militer, namun juga menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai “kebusukan sipil”. Hal ini pada gilirannya menyebabkan upaya mewujudkan kemandirian korps dan mengembangkan rasa kepercayaan diri kalangan militer pun menjadi terhambat. Jika pada masa-masa awal adanya komitmen petinggi militer untuk tidak menyampuri kehidupan non-politik telah menghambat terciptanya pretorianisme, maka pada tahun 1950-an awal, hal ini disebabkan karena adanya perpecahan internal. Ketidakkompakan kelompok militer ditandai dengan kurang harmonisnya hubungan masing-masing faksi yang bertikai di jajaran elit. Hal ini menyebabkan kaum politisi sipil semakin berada di atas angin untuk terus mengontrol dan memeralat militer untuk mencapai kepentingan politiknya.

### **Politik Militer Tahun 1955: Awal Kebangkitan Pretorian**

Pasca peristiwa di tahun 1952, kehidupan militer secara politik benar-benar memasuki era “kegelapan”. Pada masa-masa itu, pihak sipil, dalam hal ini kabinet, masih berusaha sedapat mungkin memecah belah tentara. Sedangkan para politisi yang ada di parlemen kerap menjadikan militer sebagai alat untuk mengeruk keuntungan politis. Dan ini sesungguhnya bukan tidak disadari sama sekali oleh pihak militer.

Dalam kondisi keterpurukan itu, belakangan mulailah muncul benih-benih kebersamaan yang memicu suatu kesadaran baru di antara mereka. Suatu kesadaran yang awalnya tumbuh dan berkembang di dalam wilayah AD, namun pada akhirnya



menjadi suatu kesadaran bersama kelompok militer. Berangsur-angsur para perwira menyadari bahwa selama ini mereka telah membiarkan diri mereka diperkuda oleh kaum politisi, yang kemudian telah menyebabkan tergerogotinya persatuan sekaligus membuka pintu lebar-lebar bagi campur tangan mereka dalam persoalan militer.

Kesadaran ini yang secara mengejutkan tumbuh hampir serempak disemua faksi yang ada ditubuh militer belakangan telah menyebabkan dimulainya suatu upaya dialog antara eksponen-eksponen militer dalam pertengahan 1954. Pertemuan itu kemudian diperluas di antara perwira-perwira senior pada Januari 1955, yang menghasilkan suatu kepanitiaan. Panitia ini diberi tugas merencanakan sebuah kongres besar perwira tentara, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan persatuan di dalam tubuh militer. Sebagai hasilnya, pada 17-25 Februari 1955 di Yogyakarta diadakan suatu konferensi militer yang dihadiri oleh 270 perwira tinggi dan menengah. Konferensi militer itu kemudian menghasilkan suatu resolusi, yang kemudian lazim disebut “Piagam Yogya”.

Menurut Sundhaussen, jika diperhatikan secara seksama, piagam tersebut sekilas bersifat simbolik saja, yang bahkan secara sinis dikatakan sebagai sekadar media curah perasaan untuk mengeluarkan *uneg-uneg* dan aspirasi para perwira yang berkumpul pada saat itu. Namun, hal yang patut diperhatikan adalah bahwa simbol yang ada itu jelas merupakan bentuk simbolisasi persatuan di dalam tubuh militer, meskipun harus pula diakui baru dalam tahap awal saja dan belum mencakup seluruh komponen.<sup>18</sup>

Hal penting lainnya di dalam piagam itu adalah adanya kesadaran untuk memiliki kejelasan akan hak prerogatif pihak militer, yang harus dibedakan dengan hak-hak politisi sipil. Konferensi menyatakan pula keyakinan bahwa pemerintah harus menegaskan kedudukan Angkatan Darat dalam negara dan masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman antara pemimpin-pemimpin militer dan kaum politisi. Dokumen itu juga secara eksplisit sekali menyatakan ketidaksetujuan korps perwira dengan kebijakan yang sewenang-wenang mengenai personalia yang didasarkan atas pertimbangan politik partai.<sup>19</sup>

Konferensi Yogya, dengan piagam yang dihasilkannya, merupakan momentum yang menentukan dalam proses rekonsiliasi di kalangan AD pada khususnya dan militer

---

<sup>18</sup> Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 142.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

sebagai suatu golongan pada umumnya. Piagam ini sesungguhnya makin menyadarkan pihak militer akan peran apa yang seharusnya mereka emban di dalam percaturan politik nasional, sekaligus hak-hak yang sepatutnya mereka miliki *vis avis* kepentingan sipil. Semacam *common platform* mengenai hal-hal tersebut, dalam bentuk substantifnya, telah terbangun pada saat itu. Dengan kenyataan itu, kebangkitan peran politik militer (pretorian) tengah menuju suatu proses pematapan yang makin tak terelakan. Hal itu segera makin diperkuat dan dipercepat dengan adanya peristiwa yang terjadi sesudahnya pada tahun yang sama.

Di sisi lain, para politisi sipil pada saat itu belum sepenuhnya menyadari akan adanya angin perubahan (*wind of change*) di dalam tubuh militer. Perubahan yang cepat dan penting itu terlihat bagai angin sepoi-sepoi saja itu di mata mereka. Baru belakangan mereka menyadari bahwa angin tersebut lebih sebagai puting beliung yang terasakan terutama oleh PM Ali Sastroamidjojo dengan jajaran kabinetnya di pertengahan tahun 1955.

Awal dari malapetaka bagi Kabinet Ali dan sekaligus pematapan bagi kebangkitan peran politik militer itu adalah ketika Kolonel Bambang Sugeng (KSAD) menyampaikan permintaan berhenti pada tanggal 2 Mei 1955 kepada pemerintah. Permintaan itu sendiri sesungguhnya tinggal menunggu waktu saja mengingat karakter Sugeng yang lemah dan tidak berwibawa baik di mata pemerintah maupun para perwira-perwira di bawahnya. Segera saja naluri pemenuhan kepentingan kalangan politisi bangkit untuk memanfaatkan posisi lowong yang strategis itu untuk memperkuat posisi dan kedudukan mereka. Dan tampaknya PNI dan kabinet yang di pimpin oleh Ali merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk itu.

Sesungguhnya, dengan kebulatan tekad mereka yang baru, pihak militer telah memperingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan resolusi Yogya. Pada tanggal 17 Mei 1955 Kolonel Simbolon, dalam pidatonya di muka umum di Medan, mendesak pemerintah untuk memperhatikan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam konferensi Yogyakarta. Sebuah rapat para panglima pada akhir Mei menuntut agar pengangkatan KSAD itu tidak disasarkan pada peristiwa 17 Oktober 1952 karena persoalan itu telah diselesaikan di Yogyakarta, melainkan atas dasar senioritas.

Namun nampaknya kepongahan dan rasa percaya diri yang tinggi kaum sipil telah menyebabkan peringatan tersebut terabaikan. Walhasil, pemerintah kemudian membuat semacam kriteria sendiri, yang kemudian memunculkan tiga calon pengganti, yakni Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Sudirman, dan Kolonel Bambang Utoyo. Ketiga calon tersebut plus Kolonel Bachrun yang diusulkan Soekarno-Hatta menjadi pilihan kalangan politisi sipil. Menurut kaca mata militer, kriteria yang disusun militer itu sama sekali tidak aspiratif dan dipandang telah melecehkan kehendak dan hak-hak militer. Bagi militer, sosok yang tepat untuk pada saat itu adalah Kolonel Simbolon atau Kolonel Nasution, yang dipandang sebagai perwira-perwira senior yang lebih pantas dibandingkan calon-calon dari sipil tersebut.

Sebenarnya, semua calon yang diajukan itu sebelumnya sudah menjelaskan bahwa mereka akan menolak jika dipilih karena tidak seorang pun dari mereka memenuhi persyaratan yang telah disepakati Korps Perwira. Tetapi, Kolonel Bambang Utojo, ketika ditawari jabatan itu untuk kedua kalinya, menyatakan bersedia menerimanya, tanpa berkonsultasi dengan pimpinan AD. Pada tanggal 10 Juni 1955, Soekarno menandatangani surat pengangkatannya.

Pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD makin mengentalkan sikap “permusuhan” militer terhadap pemerintahan sipil. Kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah ini memang semata-mata didasarkan atas pertimbangan politis tanpa menjajaki keinginan Angkatan Darat.<sup>20</sup> Hal mana kemudian memicu munculnya peristiwa subordinasi atau pembangkangan institusional. Demikianlah, pada tanggal 27 Juni 1955, militer (AD) melakukan pemboikotan terhadap pelantikan KSAD yang baru. Pada saat yang bersamaan, Kolonel Zulkifli Lubis memberitahukan kepada kabinet bahwa dia menolak untuk menyerahterimakan wewenangnya kepada Bambang Utojo dan lebih jauh menuntut diakhirinya politisasi militer.

Aksi pemboikotan yang mendapat dukungan luas dari jajaran militer ini ternyata berbuntut panjang. Di luar perkiraan banyak pihak, dukungan terhadap militer semakin meluas bahkan menjalar hingga kalangan sipil, baik yang ada di pemerintahan, parlemen, maupun pers. Hal ini terutama setelah militer menunjukkan kegigihan memperjuangkan kepentingannya dan terus menggembar-gemborkan arti penting militer sebagai alat

---

<sup>20</sup> Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 72.

negara dan bukan alat kepentingan politik. Menurut Finer, pada saat pihak militer menarik garis yang membedakan antara bangsa dan pemerintah yang sedang berkuasa, sesungguhnya mereka mulai mengembangkan gagasan mereka sendiri mengenai apa yang dimaksudkan dengan kepentingan nasional. Dari sini sesungguhnya hanya tinggal satu lompatan lagi ke tahap di mana pandangan mereka itu terpaksa menggantikan pandangan pemerintah sipil.<sup>21</sup>

Segera setelah dukungan itu semakin mantap, satu per satu pihak koalisi pemerintah mulai mengundurkan diri. Setelah tekanan yang ada semakin menghebat, pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali pun mengundurkan diri. Dalam sebuah sistem politik nasional yang labil, yang ditandai dengan jatuh banggunya pemerintahan, apa yang dialami oleh kabinet Ali bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, bagi suatu kekuatan politik yang selama ini hanya memainkan peran perifer, kejatuhan Kabinet Ali jelas merupakan “prestasi” tersendiri bagi kelompok militer, yang oleh berbagai kalangan dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hal itu.

Langkah yang ditempuh oleh militer pada saat itu sesungguhnya memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh untuk tidak lagi diperalat oleh kalangan sipil, sekaligus pembuktian bahwa mereka cukup berani untuk mengejawantahkan komitmen yang telah digalang dan ditetapkan pada bulan-bulan sebelumnya. Kepercayaan diri untuk berbuat sesuatu yang berbeda pada masa-masa sebelumnya, seolah diperlihatkan dengan cara-cara yang transparan dan taktis pada saat itu.

Adanya peristiwa pembangkangan pada 27 Juni 1955 itu, sebagai buah dari komitmen bersama yang telah digalang sejak awal tahun, sesungguhnya menyadarkan arti penting persatuan di kalangan internal militer, suatu ganjaran yang memang terasa demikian cepat mengingat komitmen itu baru berjalan dalam hitungan bulan saja. Secara historis, di dalam konteks persatuan internal, keberhasilan militer memaksakan kehendak untuk mengangkat tokoh senior dalam hal ini Nasution menjadi KSAD telah menutupi kemungkinan keterpecahan lebih lanjut di tubuh militer pada masa-masa selanjutnya.

Secara tidak langsung, hal ini menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi. Tidak terbayangkan nasib bangsa ini jika Nasution tidak sempat melakukan pembenahan di dalam tubuh militer pada tahun itu, mengingat pada masa-masa selanjutnya tantangan

---

<sup>21</sup> LS. E, Finer, S.E, *The Man on Horseback*, (London: Transaction Publishers, 1976), hlm.23.

perpecahan disintegrasi semakin membesar. Dan keberhasilan Nasution di masa-masa selanjutnya dalam memimpin militer dalam menyelamatkan bangsa ini telah memberikan nilai (*credit point*) yang besar bagi militer untuk dapat berperan lebih aktif lagi di dalam kancah politik nasional.

Di samping itu, keberanian mereka untuk menentang pemerintah, sebagai sebuah aksi yang diejawantahkan, secara politis, menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan tentara bahwa mereka tidak saja dapat terbebas dari belenggu kepentingan politis kaum sipil, namun juga melihat dampak yang ditimbulkan saat itu dapat turut mempengaruhi jalannya kehidupan politik nasional di masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup> Mungkin saja peran militer tidak akan membesar jika mereka tidak dengan sengaja dan berani melakukan perlawanan terhadap sipil pada saat itu. Kepercayaan diri sipil akan makin menguat dan campur tangan mereka dalam kehidupan militer akan dianggap sebagai “kebiasaan yang wajar”.

Pun demikian pengalaman politik di atas juga telah membuka mata para perwira bahwa alternatif-alternatif yang ada dalam hubungan sipil-militer tidak sekedar merupakan pilihan antara pengakuan penuh atas supremasi sipil atau suatu kudeta militer. Masih ada satu alternatif lain, yakni dengan jalan menolak kerja sama dengan pemerintah melalui suatu veto. Artinya, peristiwa di atas telah menghidupkan kembali gagasan bahwa tentara tidak dengan sendirinya harus menerima baik semua instruksi yang diberikan oleh pihak sipil yang sedang berkuasa. Di sinilah sebenarnya militer seolah menemukan pembenaran akan perlunya kemandirian dari sisi agenda politik, sekaligus pembenaran terhadap perlunya keterlibatan mereka di dalam dunia politik, minimal agar posisi tawar mereka tidak terlalu lemah dan ketergantungan mereka terhadap sipil semakin mengecil.

Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa peristiwa di seputar tahun 1955 itu telah memenuhi semua syarat kebangkitan politik militer. Sehingga tidak diragukan bahwa pada saat itulah momentum awal bagi kebangkitan peran politik militer di tanah air berawal. Sebagai dampaknya peran perifer yang dilakoni militer telah mulai tertinggalkan dan seperti yang dikatakan oleh Yahya Muhaimin mulai saat itu secara *de facto* militer telah menjelma menjadi suatu kekuatan politik baru yang mulai aktif

---

<sup>22</sup> Crouch, *op. cit.*, hlm. 29.

memainkan peranannya.<sup>23</sup> Hal yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dan terbayangkan di masa-masa sebelumnya.

## Penutup

Setelah selama 10 tahun militer bersikap menerima supremasi sipil dengan segala konsekuensinya, sejak tahun 1955 sikap tersebut mulai ditinggalkan. Momentum awalnya ialah diadakannya Konferensi di Yogyakarta akhir Februari 1955, yang kemudian disusul dengan “Peristiwa 27 Juni 1955”. Berbagai peristiwa di tahun 1955 itu pada hakekatnya menandai suatu persatuan yang baru di kalangan Angkatan Darat, yang didasarkan atas keyakinan bahwa (1) campur tangan pihak sipil telah demikian melewati batas, (2) pentingnya untuk terbebas dari kungkungan kepentingan sesaat kaum politisi, dan (3) komitmen yang kuat untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian dan keberdayaan politik golongan militer di tanah air. Konferensi Jogja 1955 dengan dampak yang ditimbulkan tersebut tak pelak menandai hadirnya sebetulnya model militer pretorian di Indonesia, yang menemukan bentuk terkuatnya di masa Orde Baru. Model pretorian ini pada akhirnya berakhir di akhir tahun 1998 seiring dengan semakin kencangnya angin demokratisasi, yang kemudian menempatkan lagi kalangan sipil sebagai penentu arah kehidupan politik bangsa hingga saat ini.

## Daftar Pustaka

- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Feith, Herbert. 1964). *The Decline of the Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Finer, S.E. 1976. *The Man on Horseback*. London: Transaction Publishers.
- Iswadi. 2000. *Bisnis Militer Orde Baru*. Bandung: Rosda Karya.
- Lukes, Steven. 2005. *Power A Radical View*. New York: Palgrave MacMillan.
- Muhaimin, Yahya. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: GMUP.
- Nordlinger, Eric. 1994. *Militer Dalam Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosusanto, Nugroho, ed. 1984. *Pejuang Dan Prajurit*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ongkhokham. 1985. “Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah”, dalam *Seri Prisma I: Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sanit, Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Sundhasussen, Ulf. 1982. *Politik Militer Indonesia, 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm.81.